

# Indonesia dan Tender Infrastruktur 2020

Apa yang Terbaca dari Data?

Indonesia Corruption Watch

April 2022



# Indonesia dan Tender Infrastruktur 2020

## Apa yang Terbaca dari Data?

Ulasan Singkat<sup>1</sup>

### Ringkasan Eksekutif

Dalam 10 tahun terakhir, 53% tender publik di Indonesia adalah tender untuk proyek konstruksi. Tercatat, kasus korupsi proyek infrastruktur meningkat 50% di Indonesia antara tahun 2015 dan 2018. Pada tahun 2020, Indonesia melaksanakan 48,83% tender infrastruktur (36.871 tender) dari total 75.326 tender. Secara total, selama tahun 2020, nilai kontrak untuk semua tender infrastruktur adalah Rp183,77 triliun (USD12,8 miliar).

Laporan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana data tender infrastruktur dapat dianalisis. Selain itu, juga mencakup sejauh mana metodologi dan indikator *red flag* ICW dan/atau OCP dapat diterapkan pada proyek dan kontrak infrastruktur; dan apakah ada indikator *red flag* tambahan yang harus ditambahkan ke metodologi *red flag* ICW dan/atau OCP yang akan sangat penting atau berguna untuk infrastruktur.

Studi ini akan menilai data yang tersedia di Opentender.net berdasarkan 3 (tiga) pedoman OCP (lihat metode dan ruang lingkup). Menggunakan indikator yang sudah diterapkan di platform

Opentender, laporan tersebut menganalisis data proyek infrastruktur 2020 untuk melihat seperti apa analisisnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data pengadaan dalam kurun waktu 1 Januari-31 Desember 2020. Pada beberapa indikator, penelitian mencakup penelusuran daring secara manual untuk mencermati rekam jejak perusahaan.

Data pengadaan yang dianalisis untuk laporan ini terbatas pada proses tender dan tender cepat pada tahap perencanaan, pemilihan penyedia, dan penetapan pemenang untuk proyek infrastruktur. Tidak ada data yang tersedia untuk penelitian tentang proyek infrastruktur yang didanai oleh perjanjian kerangka kerja atau kemitraan publik-swasta. Dapat dikatakan bahwa Opentender sudah mencakup 100% data pemerintah tentang proyek infrastruktur yang didanai menggunakan APBN. Pada tahun 2020, terdapat 37.977 (48,06%) pengadaan terkait infrastruktur menggunakan metode tender dengan nilai total Rp183,77 Triliun (USD12,8 Miliar). Analisis ini dilakukan terhadap setiap kumpulan data yang

<sup>1</sup>Riset dari Christian Evert Tuturoong, Siti Juliantari Rachman, Wana Alamsyah - Indonesia Corruption Watch, ulasan dari Nanda Sihombing, and Mariana San Martin





## Latar Belakang

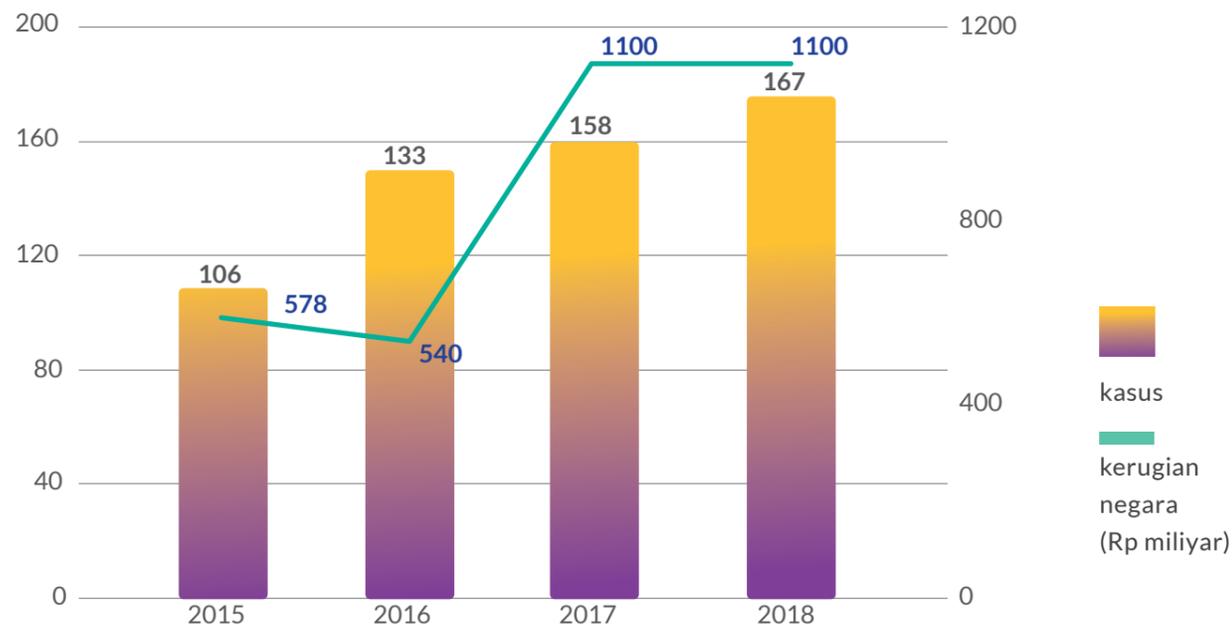
Pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019, hingga 40% dari 1.783 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum di Indonesia terkait dengan proses pengadaan publik, dengan rekor tertinggi yang tercatat oleh Indonesia Corruption Watch pada tahun 2019 mencapai 64%.

Dalam 10 tahun terakhir, 53% dari tender di Indonesia berkaitan dengan konstruksi. Proyek-proyek konstruksi tersebut telah diberikan kepada perusahaan yang menjadi 10 besar perusahaan penerima nilai kontrak publik terbesar antara 2011-2020. Sepuluh perusahaan yang sama tersebut juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kesemuanya terlibat kasus korupsi (lihat Lampiran 2 untuk contoh).<sup>3</sup>

Analisis terhadap proses pengadaan infrastruktur menjadi penting karena mendominasi pengeluaran pemerintah setiap tahun dalam 10 tahun terakhir dengan banyak ditemukan kasus korupsi selama proses kontraknya. Tercatat ada peningkatan 50% kasus korupsi proyek infrastruktur dan pengadaan di Indonesia antara tahun 2015 dan 2018.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis data tender infrastruktur 2020 yang tersedia di Opentender untuk mencoba melihat *red flag*/'bendera merah' berdasarkan indikator pada beberapa *template* dan panduan yang disediakan oleh Open Contracting Partnership.

Grafik 1.1 Tren Korupsi dalam Sektor Infrastruktur 2015 - 2018



Tren Korupsi yang Meningkat di Sektor Infrastruktur 2015-2018.

Sumber: (diolah ICW oleh Katadata)

<sup>3</sup>Untuk informasi lebih detail, lihat Lampiran 2



## Tujuan

ICW menyampaikan laporan ini untuk menilai sejauh mana data yang ada terkait infrastruktur dapat dianalisis. Ini juga mencakup sejauh mana:

- Metodologi dan indikator *red flag* ICW dan/atau OCP juga dapat diterapkan pada proyek dan kontrak infrastruktur; dan
- Apakah ada indikator *red flag* tambahan yang harus ditambahkan ke metodologi *red flag* ICW dan/atau OCP yang akan sangat penting atau berguna untuk infrastruktur.



## Cakupan Data & Metode

### Metode

Studi ini akan menilai data yang tersedia di Opentender berdasarkan 3 (tiga) pedoman OCP:

1. Kasus & indikator penggunaan (*Open Contracting for Infrastructure Data Standards Toolkit*) OC4IDS;
2. Red Flag untuk *Template* Pemetaan OCDS; dan
3. Panduan Kasus Penggunaan Terkait dengan OCDS. Laporan tersebut menerapkan kasus penggunaan dan indikator dalam 3 (tiga) dokumen dan memetakan data yang tersedia untuk menilai sejauh mana metodologi dan indikator yang dapat diterapkan pada proyek infrastruktur.

Dengan indikator yang sudah tersedia di platform Opentender, laporan tersebut mempelajari data proyek infrastruktur tahun 2020 untuk melihat seperti apa analisisnya. Laporan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data pengadaan mulai 1 Januari - 31 Desember 2020. Untuk beberapa indikator, studi dilakukan secara penelusuran daring manual untuk mengecek rekam jejak perusahaan.

Data yang tersedia pada Opentender adalah data resmi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai sumber data. Unit analisisnya adalah proses kontrak tingkat nasional oleh instansi pemerintah (kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota).

## Cakupan Data

Ada 4 (empat) jenis pengadaan di Indonesia<sup>4</sup>: barang, konstruksi, jasa konsultansi dan jenis jasa lainnya. Kajian ini akan fokus menganalisis jenis pengadaan konstruksi yang dilakukan pada tahun 2020.

Terdapat 5 (lima) metode yang dikenal dalam sistem kontrak publik Indonesia (*e-purchasing*, *direct procurement* atau pengadaan langsung, *direct appointment* atau penunjukan langsung, *quick tender* atau tender cepat, dan *tender seleksi*)<sup>5</sup>, namun penelitian ini hanya berfokus pada metode tender di pengadaan konstruksi.

Tabel 1.1 Metode Pengadaan dan Ketersediaan Data

No	Metode	Ketersediaan Data
1.	E-Purchasing	Tidak tersedia
2.	Pengadaan Langsung	Tidak tersedia
3.	Penunjukan Langsung	Tidak tersedia
4.	Tender Cepat	Tersedia
5.	Tender / Seleksi	Tersedia

Dari 5 (lima) fase dalam kontrak publik (perencanaan, proses pemilihan, penetapan pemenang, kontrak, dan implementasi)<sup>6</sup>, penelitian ini berfokus pada tiga siklus pertama: proses pemilihan, dan kontrak berdasarkan ketersediaan data.

Tabel 1.2 Tahapan Kontrak Publik dan Ketersediaan Data

No	Tahapan Kontrak Publik	Ketersediaan Data
1.	Perencanaan	Tersedia (sejak 2013)
2.	Pemilihan penyedia	Tersedia
3.	Penetapan pemenang	Tersedia
4.	Kontrak	Tidak tersedia
5.	Implementasi	Tidak tersedia

<sup>4</sup>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Umum. Pasal 38 dan 41

<sup>5</sup>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Umum. Pasal 38 dan 41

<sup>6</sup>Open Contracting Partnership, The Contracting Process, [https://standard.open-contracting.org/latest/en/getting\\_started/contracting\\_process/](https://standard.open-contracting.org/latest/en/getting_started/contracting_process/) yang diakses pada 2 Januari 2021

Data yang digunakan secara khusus berasal dari periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020 yang datanya bersumber dari LKPP. Data terdiri dari 3 (tiga) cluster informasi tentang:

1. Data rencana umum pengadaan
2. Data pengumuman
3. Data tender selesai

Ketiga cluster tersebut kemudian dianalisis menggunakan pedoman *Open Contracting Data Standard (OCDS): Redflags to OCDS<sup>7</sup> Mapping, Use Case Guide: Indicators Linked to OCDS<sup>8</sup>, Procurement Market Indicators<sup>9</sup>*. Berdasarkan pedoman tersebut, studi ini mengidentifikasi 5 (lima) dimensi dan 14 indikator untuk dianalisis, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1.3 Dimensi dan Indikator Penelitian

No	Dimensi	Indikator
1.	Kompetisi dan Kesempatan Pasar	1. Konsentrasi Pasar
		2. 10 Penyedia Teratas dengan Total Kontrak Terbesar
		3. Persentase Kontrak yang Diberikan kepada 10 Penyedia Teratas
		4. Jumlah penyedia yang baru pertama kali memenangkan kontrak (Penyedia Baru)
		5. Perbandingan antara Penyedia Baru dengan seluruh penyedia
		6. Persentase pertumbuhan penyedia baru di setiap K/L/PD
2.	Efisiensi Internal	1. Persentase jumlah tender gagal
		2. Durasi antara tanggal pengumuman tender dan tanggal penetapan pemenang
3.	Value for Money	1. Persentase nilai kontrak di atas HPS
		2. Persentase nilai kontrak di bawah HPS (Penghematan)

<sup>7</sup>Open Contracting Partnership, The Contracting Process, [https://standard.open-contracting.org/latest/en/getting\\_started/contracting\\_process/](https://standard.open-contracting.org/latest/en/getting_started/contracting_process/) diakses pada 2 Januari 2021.

<sup>8</sup>Open Contracting Partnership, Redflags to OCDS Mapping, <https://www.open-contracting.org/resources/red-flags-integrity-giving-green-light-open-data-solutions/> diakses pada 2 Januari 2021.

<sup>9</sup>Open Contracting Partnership, Use case guide: Indicators linked to OCDS, <https://www.open-contracting.org/resources/using-it/> diakses pada 2 Februari 2021.

Tabel 1.3 Dimensi dan Indikator Penelitian

No	Dimensi	Indikator
4.	Integritas Publik	1. Persentase jumlah tender dengan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
		2. Persentase jumlah tender dengan judul kurang dari 20 karakter
		3. Persentase jumlah tender dengan keterangan kurang dari 60 karakter
		4. Persentase jumlah tender tanpa informasi jenis pengadaan
5.	Red Flag	1. Pengadaan dengan Nilai Kontrak Tertinggi
		2. Pengadaan di Kuartal Keempat

## Referensi untuk Sumber Daya OCP

### Sumber Daya Indikator yang Tersedia untuk Analisis

Kasus penggunaan & indikator OC4IDS	<p>3 kasus penggunaan yang berlaku dari 29 kasus penggunaan OC4IDS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ulangi pemenang untuk mengukur kompetisi.</li> <li>2. Jenis pengadaan, antara tender dan non-tender, untuk mengukur persaingan di setiap jenis</li> <li>3. Nilai tender vs nilai penghargaan untuk mengukur nilai uang</li> </ol> <p>Silakan lihat detail kasus penggunaan yang diterapkan di Lampiran 1.2.</p>
Red flag untuk Pemetaan OCDS	<p>3 dari 119 indikator yang berlaku untuk Opentender di Redflags ke template Pemetaan OCDS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Item baris yang terlalu rendah</li> <li>2. Item baris yang terlalu tinggi</li> <li>3. Tawaran terlalu dekat dengan anggaran, perkiraan, atau solusi pilihan</li> </ol> <p>Silakan lihat detailnya di <i>Mapping templates</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Item baris yang terlalu rendah</li> <li>2. Item baris yang terlalu tinggi</li> <li>3. Tawaran terlalu dekat dengan anggaran, perkiraan, atau solusi pilihan</li> </ol> <p>Silakan lihat detailnya di Lampiran 2.1..</p>

### Sumber Daya Indikator yang Tersedia untuk Analisis

Red flag untuk Pemetaan OCDS	<p>3 indikator tambahan oleh ICW berdasarkan konteks Indonesia yang tidak tersedia pada <i>template</i> Pemetaan Redflags ke OCDS OCP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai yang lebih tinggi mewakili risiko yang lebih tinggi</li> <li>2. Penghematan nilai penghargaan yang rendah dari nilai tender (perkiraan pemilik)</li> <li>3. Anggaran terburu-buru untuk memaksimalkan belanja di akhir tahun anggaran.</li> </ol> <p>Silakan lihat detailnya di Lampiran 2.2.</p>
Use-Case Guide Linked to	<p>13 dari 52 indikator panduan kasus penggunaan yang terkait dengan OCDS berlaku untuk data Opentender, termasuk 2 indikator yang memerlukan penyesuaian berdasarkan konteks Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase 10 penyedia teratas dengan total kontrak terbesar untuk mengukur peluang pasar</li> <li>2. Jumlah penyedia baru yang diberikan untuk mengukur kesempatan pasar</li> <li>3. Persentase kontrak yang diberikan kepada penyedia baru untuk mengukur kesempatan pasar</li> <li>4. Total nilai yang diberikan kepada penyedia baru untuk mengukur kesempatan pasar</li> <li>5. Persentase penyedia baru ke semua penyedia untuk mengukur kesempatan pasar</li> <li>6. Konsentrasi pasar untuk mengukur kesempatan pasar</li> <li>7. Persentase tender dengan judul kurang dari 10 karakter untuk mengukur integritas publik. Berdasarkan konteks bahasa Indonesia, indikator ini disesuaikan dari 10 karakter menjadi 20 karakter.</li> <li>8. Persentase tender dengan kurang dari 30 karakter dalam deskripsi untuk mengukur integritas publik. Berdasarkan konteks bahasa Indonesia, indikator ini disesuaikan dari 30 karakter menjadi 60 karakter.</li> <li>9. Persentase tender yang tidak menyertakan kode item atau deskripsi item terperinci untuk mengukur integritas publik</li> <li>10. Lamanya periode tender (hari) untuk mengukur efisiensi internal</li> <li>11. Persentase tender yang dibatalkan ke tender yang diberikan untuk mengukur efisiensi internal</li> <li>12. Persentase kontrak yang melebihi anggaran untuk mengukur nilai uang</li> <li>13. Persentase total penghematan untuk mengukur nilai uang</li> </ol> <p>Silakan lihat detail untuk indikator yang diterapkan dari Panduan Kasus Penggunaan yang ditautkan ke OCDS di Lampiran 3.</p>



## Analisis Data Tender Infrastruktur 2020

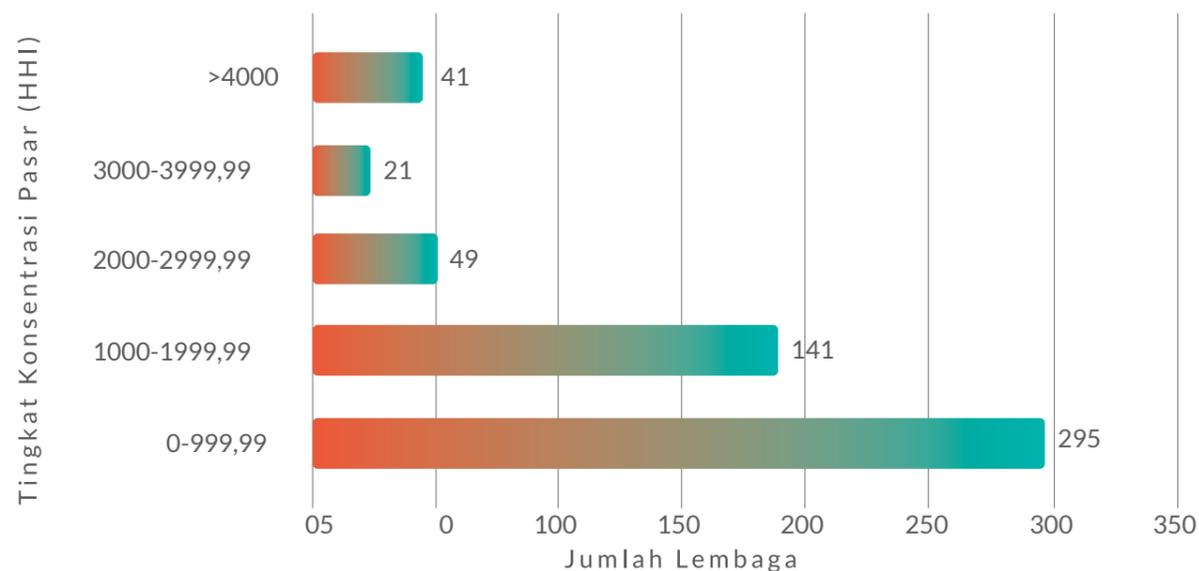
Pada tahun 2020, Indonesia melaksanakan 48,83% tender infrastruktur (36.871 tender) dari total 75.326 tender. Total nilai penghargaan untuk semua tender infrastruktur adalah Rp 180,07 triliun (USD 12,39 miliar). Analisis ini dilakukan terhadap setiap kumpulan data yang tersedia pada Januari 2021. Beberapa kumpulan data dapat diperbarui oleh lembaga pengadaan setelah penelitian dilakukan dan tidak dimasukkan dalam analisis ini.

### Kompetisi

- Konsentrasi Pasar

Konsentrasi pasar pada indikator ini menggunakan The Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Indikator ini adalah ukuran umum yang sering digunakan untuk menilai konsentrasi pasar dan kompetisi pasar. Skor HHI yang lebih tinggi menunjukkan pasar yang terkonsentrasi dengan hanya beberapa perusahaan yang bersaing. Indikator ini menganggap setiap entitas pengadaan sebagai pasar tunggal. Sebagai ilustrasi, HHI 10.000 (skor maksimum) berarti hanya ada satu perusahaan dalam proses kontrak. Nilai HHI mendekati 0 berarti pasar sangat kompetitif (konsentrasi nol). Pasar dengan HHI 2.000-3.999 dikategorikan sebagai pasar yang terkonsentrasi sedang (saingan sedang), sedangkan HHI 4.000 atau lebih besar dikategorikan pasar yang sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif).

Grafik 1.2 Konsentrasi Pasar pada 2020



Sumber: Opendender<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Opendender. Diakses pada 3 Januari 2021.

Pada tahun 2020, terdapat 41 dari 547 (7,5%) instansi pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dengan HHI<sup>11</sup> lebih dari 4.000 (lihat Lampiran 8). Artinya konsentrasi pasar sangat tinggi (tidak kompetitif) berdasarkan definisi HHI. Sementara itu, 295 instansi pemerintah (53,9%) memiliki HHI di bawah 1.000 - menunjukkan konsentrasi pasar yang rendah.

- 10 Penyedia dengan jumlah kontrak terbanyak

Tabel 1.4 10 Penyedia yang Paling Banyak Dikontrak pada 2020

Penyedia	Jumlah Kontrak	Total Nilai Penghargaan
PT. NAMBUR MARLATA	18	Rp 28,428,081,714.24
CV MORA JAYA	18	Rp 9,774,786,651.54
CV. RIAPRIMA PUTRI AMBAR	18	Rp 16,235,584,516.17
PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK.*	15	Rp 2,419,611,345,817.72
PT. NINDYA KARYA (PERSERO)*	15	Rp 2,070,788,880,821.04
KARYAMANDIRI PERKASA	15	Rp 32,945,973,430.19
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)*	14	Rp 3,127,574,594,516.04
PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK*	14	Rp 2,667,397,588,784.17
BHINAREKA UTAMA	14	Rp 100,878,250,345.79
KARYA DUTAMANDIRI SEJAHTERA	14	Rp 79,525,449,011.40

\*) Badan Usaha Milik Negara

Sumber: Opendender<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Rumus Herfindahl-Hirschman Index (HHI) memberikan hasil perhitungan dalam rentang antara 0 hingga 10.000. Pasar dengan HHI kurang dari 1.500 dianggap sebagai pasar yang kompetitif, HHI 1.500-2.500 sebagai pasar yang terkonsentrasi sedang (saingan sedang), dan HHI 2.500 atau lebih besar sebagai pasar yang sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif.)

<sup>12</sup>Opendender. Diakses pada 3 Januari 2021.

Dari tabel di atas, peneliti kemudian melakukan penelusuran manual dan menemukan bahwa 4 dari 10 penyedia infrastruktur yang paling banyak dikontrak pada tahun 2020 adalah Badan Usaha Milik Negara. Mereka adalah PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK., PT. NINDYA KARYA (PERSERO), PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO), PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

- 10 Penyedia dengan Nilai Kontrak Tertinggi

Tabel 1.5 10 Penyedia dengan Nilai Kontrak Tertinggi pada 2020

Penyedia	Jumlah Kontrak	Total Nilai Penghargaan
SINO ROAD AND BRIDGE GROUP CO., LTD	1	Rp 4,585,032,615,891.12
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)*	14	Rp 3,127,574,594,516.04
PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK*	8	Rp 2,727,411,788,503.82
PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK*	14	Rp 2,667,397,588,784.17
PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK.*	15	Rp 2,419,611,345,817.72
PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK.*	9	Rp 2,350,453,485,544.95
PT. NINDYA KARYA (PERSERO)*	15	Rp 2,070,788,880,821.04
PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.*	5	Rp 1,665,926,622,041.56
PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)*	5	Rp 1,621,821,954,000.00
PT. PP (PERSERO) TBK*	4	Rp 1,508,309,255,435.56

\*) Badan Usaha Milik Negara

Sumber: Opentender<sup>13</sup>

Dari tabel di atas, peneliti kemudian melakukan penelusuran manual dan menemukan bahwa 9 dari 10 besar penyedia dengan nilai kontrak tertinggi pada tahun 2020 adalah BUMN. Salah satu penyedia adalah Perusahaan Cina (Sino Road and Bridge Group Co., LTD) dengan *joint-venture* dengan dua BUMN lainnya (PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya).

<sup>13</sup>Opentender. Diakses pada 3 Januari 2021.

Ringkasnya, di pasar infrastruktur, mayoritas penyedia adalah BUMN. Dari kesiapan administrasi selama masa prakualifikasi, jumlah aset yang dimiliki dijadikan jaminan, alat dan perlengkapan<sup>14</sup> menjadi salah satu alasan mengapa BUMN menjadi pemenang untuk sebagian besar proyek konstruksi publik. Untuk menilai lebih lanjut tentang rekam jejak 10 besar penyedia dengan nilai kontrak tertinggi pada tahun 2020, studi dilakukan manual secara daring penelusuran dengan temuan sebagai berikut:

Tabel 1.6 Rekam Jejak 10 Penyedia Teratas dengan Nilai Kontrak Tertinggi pada 2020

Penyedia	Rekam Jejak
SINO ROAD AND BRIDGE GROUP CO., LTD	Salah satu perusahaan China (Sino Road and Bridge Group Corporation - SRBGC) memenangkan kontrak pembangunan jalan tol antar kota pada tahun 2020 dengan total nilai Rp 4,58 triliun (USD 63,1 miliar). Kontrak ini dilakukan melalui skema <i>Joint-Venture</i> dimana pekerjaan dilakukan antara 3 perusahaan dengan porsi BPRS sebesar 55% sedangkan PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya masing-masing sebesar 22,5%
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	Pejabat di BUMN ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi melalui modus operandi pelaksanaan proyek konstruksi fiktif antara 2009-2015 dengan total perkiraan kerugian negara Rp 202 miliar (USD 14 juta) (PT Waskita Karya), persekongkolan dalam proyek pembangunan Waterfront City Bridge 2015-2016 senilai total perkiraan Rp 39,2 miliar (USD 2,7 juta) (PT Adhi Karya) kerugian negara, dan kerugian negara lainnya dari kasus penggelapan sebesar Rp 6 miliar (USD 416 ribu) (PT Brantas Adipraya).
PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK	Saksi Pelatihan Pembangunan Rumah Sakit dan Alat Kesehatan Universitas Airlangga
PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK	Pejabat di BUMN ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi melalui modus operandi pelaksanaan proyek konstruksi fiktif antara 2009-2015 dengan total perkiraan kerugian negara Rp 202 miliar (USD 14 juta) (PT Waskita Karya), persekongkolan dalam proyek pembangunan Waterfront City Bridge 2015-2016 senilai total perkiraan Rp 39,2 miliar (USD 2,7 juta) (PT Adhi Karya) kerugian negara, dan kerugian negara lainnya dari kasus penggelapan sebesar Rp 6 miliar (USD 416 ribu) (PT Brantas Adipraya).
PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK.	
PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK	

<sup>14</sup>ICW. 2022. Analisis 10 Tahun Reformasi Pengadaan Publik di Indonesia.

Tabel 1.6 Rekam Jejak 10 Penyedia Teratas dengan Nilai Kontrak Tertinggi pada 2020

Penyedia	Rekam Jejak
PT. NINDYA KARYA (PERSERO)	PT Nindya Karya merupakan BUMN pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korporasi pada 2018 atas kasus korupsi yang merugikan negara senilai Rp313 miliar (USD21,7 juta) dari APBN 2006-2011 dalam pembangunan pembangunan Pelabuhan Kota Sabang. Modus operandi mereka adalah kolusi dan menggelembungkan biaya proyek.
PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.	Tersangka dalam proyek fiktif Tersangka dalam kasus Waterfront
PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)	Saksi kasus korupsi KTP
PT. PP (PERSERO) TBK	Saksi Pelatihan Pembangunan Rumah Sakit dan Alat Kesehatan Universitas Airlangga

Sumber: Tim Penelusuran daring ICW, 4 April 2021.

Tren yang sama dengan BUMN pemenang tender konstruksi juga dapat ditemukan secara konsisten dalam 10 tahun terakhir (2011-2020) dengan separuh dari 10 besar penyedia yang dikontrak adalah Badan Usaha Milik Negara yang tersangkut kasus korupsi<sup>15</sup>. Sebagai contoh; PT. Nindya Karya, PT. Adhi Karya, PT. Waskita Karya, PT. Brantas Abipraya, PT. Pembangunan Perumahan. Secara paralel, semua top 10 penyedia dengan nilai kontrak tertinggi sepanjang dekade juga BUMN - dengan 9 dari mereka adalah perusahaan nasional dan 1 adalah perusahaan lokal yang berbasis di ibu kota Jakarta<sup>16</sup>.

Belum ada regulasi yang memberikan tindakan afirmasi (*affirmative action*) bagi BUMN. Ada memang banyak BUMN konstruksi Nasional yang mengikuti tender dibandingkan swasta besar perusahaan konstruksi. Meskipun perusahaan konstruksi swasta ada, mereka bukan saingan untuk BUMN Nasional. Hal ini juga perlu diteliti lebih lanjut mengapa banyak swasta besar perusahaan konstruksi tidak berpartisipasi dalam tender pemerintah<sup>17</sup>. Banyak perusahaan konstruksi swasta mengikuti tender, tetapi tidak setingkat dengan BUMN nasional, sedangkan yang setaradengan BUMN Nasional enggan mengikuti tender.<sup>18</sup>

<sup>15</sup>For detailed information see Annex 3

<sup>16</sup>For detailed information see Annex 3

<sup>17</sup>ICW. 2022. Analisis 10 tahun reformasi pengadaan publik

<https://antikorupsi.org/en/article/a-decade-of-e-procurement-in-indonesia>. Diakses pada 9 Maret 2022

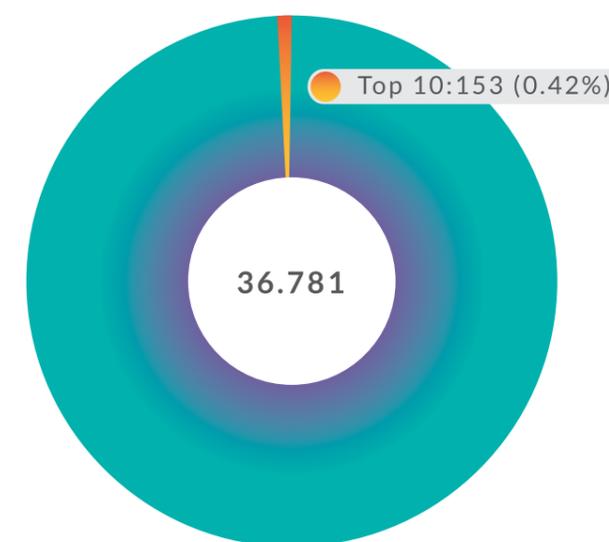
<sup>18</sup>ICW. 2022. Analisis 10 tahun reformasi pengadaan publik

<https://antikorupsi.org/en/article/a-decade-of-e-procurement-in-indonesia>. Diakses pada 9 Maret 2022

## Kesempatan Pasar

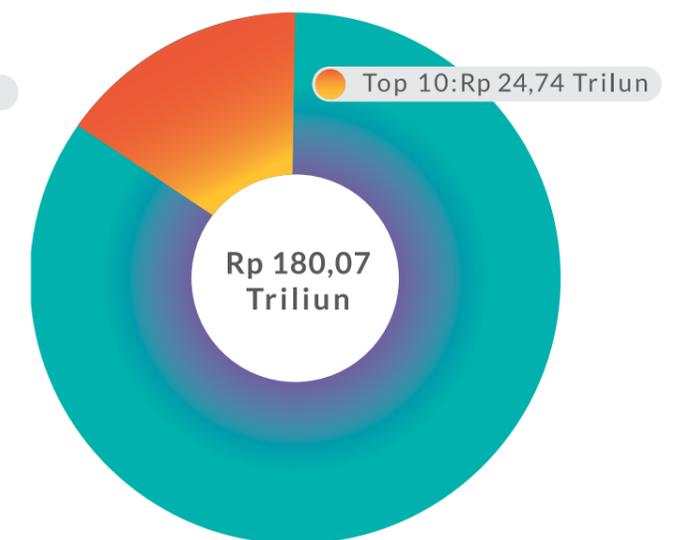
- Persentase Kontrak yang Diberikan kepada 10 Penyedia Teratas dengan Total Kontrak Terbesar vs. Persentase Nilai yang Diberikan kepada 10 Penyedia Teratas

Grafik 1.3. Persentase Kontrak yang Diberikan kepada 10 Penyedia Teratas dengan Total Kontrak Terbesar



Sumber: Opendender<sup>19</sup>

Grafik 1.4. Persentase Nilai yang Diberikan kepada 10 Penyedia Teratas



Sumber: Opendender<sup>20</sup>

Sebesar 0,42% tender (153 dari 36.781) pada tahun 2020 diberikan kepada 10 penyedia teratas. Sepuluh penyedia teratas mendominasi 13,74% dari nilai kontrak infrastruktur sebesar Rp24,74 triliun (USD1,7 miliar). Temuan mengenai 10 penyedia teratas juga telah dijelaskan pada bab kompetisi.

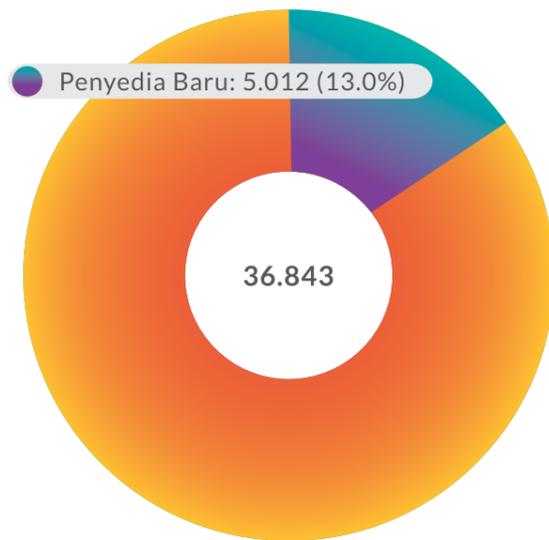
<sup>19</sup>Opendender. Diakses pada 13 Januari 2021

<sup>20</sup>Opendender. Diakses pada 13 Januari 2021

- Persentase Penyedia Baru dengan Seluruh Penyedia Berdasarkan Jumlah Kontrak vs. Persentase Penyedia Baru dengan Seluruh Penyedia Berdasarkan Nilai Kontrak

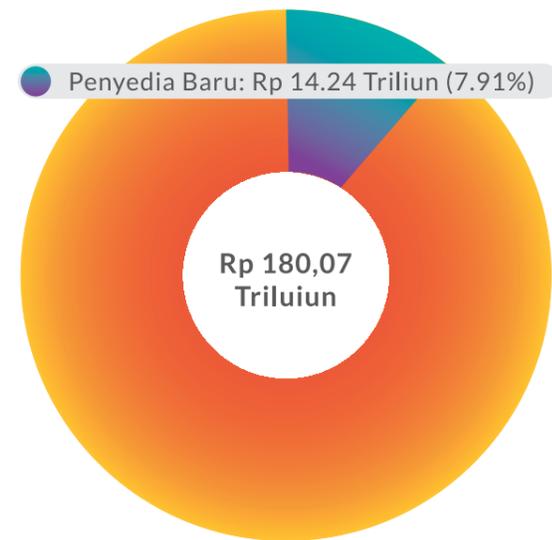
Penyedia baru adalah penyedia yang belum pernah mendapatkan kontrak pada tahun-tahun sebelumnya (2011-2019) di instansi pemerintah manapun.

Grafik 1.5. Persentase Penyedia Baru dengan Seluruh Penyedia Berdasarkan Jumlah Kontrak



Sumber: Opentender<sup>21</sup>

Grafik 1.6 Persentase Penyedia Baru dengan Seluruh Penyedia Berdasarkan Nilai Kontrak



Sumber: Opentender<sup>22</sup>

Ada 5.012 penyedia baru dari 36.843 total penyedia (13,6%) pada tahun 2020. Penyedia baru menerima 7,91% dari total nilai kontrak infrastruktur; Rp14 triliun (USD 964 juta) dari Rp180,07 triliun (USD 12,3 miliar).

Di bawah sub indikator kesempatan pasar ini, analisis lebih lanjut tentang jenis penyedia baru yang berpartisipasi dalam pengadaan publik tidak dapat dilakukan karena kurangnya keterbukaan data. Studi ini merekomendasikan peningkatan pengungkapan data untuk analisis yang lebih baik.

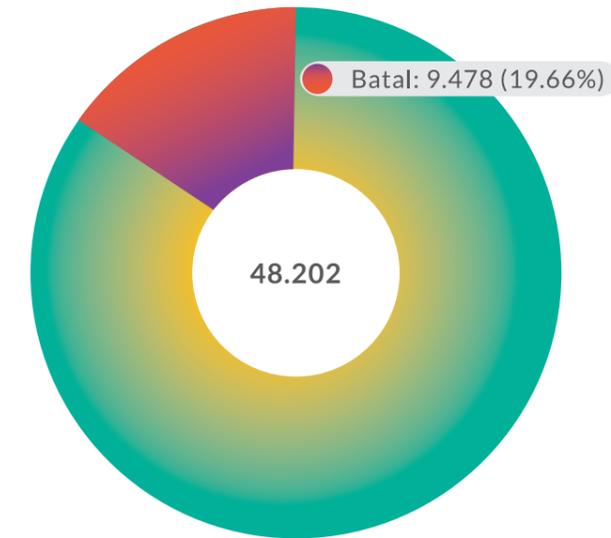
<sup>21</sup>Opentender. Diakses pada 13 Januari 2021

<sup>22</sup>Opentender. Diakses pada 13 Januari 2021

## Efisiensi Internal

- Persentase Tender Gagal

Grafik 1.7 Persentase Tender Gagal pada 2020



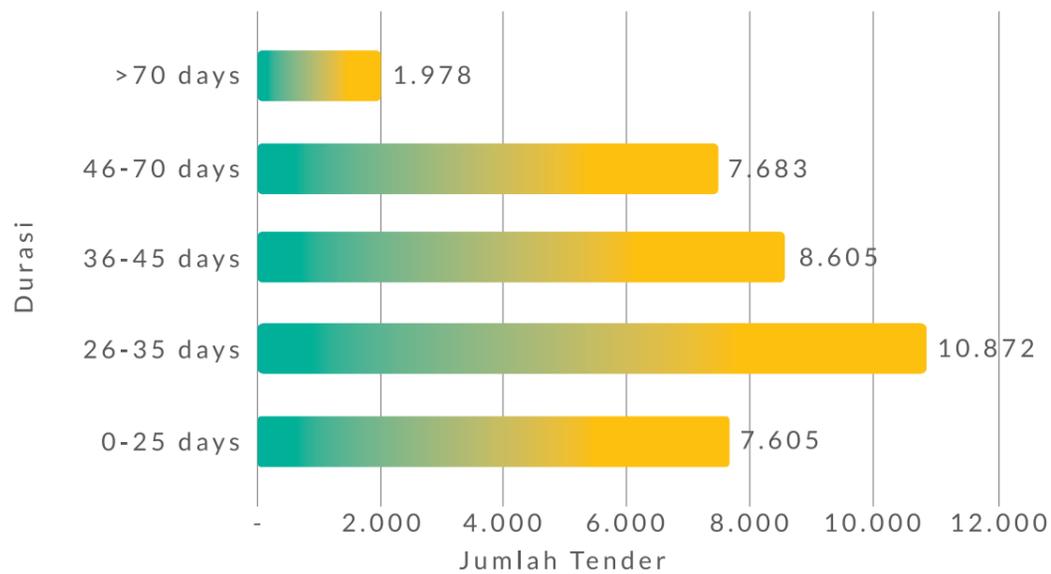
Sumber: Opentender<sup>23</sup>

Ada 9.478 tender gagal dari total 48.202 tender (19,66%) pada tahun 2020. Sayangnya, penyebab tender gagal tidak dapat dianalisis karena kurangnya data. Data yang tersedia saat ini hanya dalam format teks tidak terstruktur yang mana sebagian besar informasinya tidak lengkap/kosong. Kurangnya kategori penyebab batalnya tender menjadi tantangan dalam analisis lebih lanjut.

<sup>23</sup>Opentender. Diakses pada 13 Januari 2021

- Durasi antara Tanggal Pengumuman dengan Penetapan Pemenang

Grafik 1.8. Durasi antara Tanggal Pengumuman dengan Penetapan Pemenang



Sumber: Opentender<sup>24</sup>

5,4% dari tender (1.978 dari 36.743) memiliki masa tender lebih dari 70 hari. Durasi tender terlama pada 2020 terjadi pada 1.978 dari 36.743 tender (5,4%) dengan durasi lebih dari 70 hari kalender. Durasi tender yang paling banyak antara 26-35 hari sebesar 29,6% (10.872 tender) dari total tender. Durasi tender tercepat terjadi antara 0-25 hari kalender sebesar 20,7% (7.605 tender).

Artinya seperlima tender infrastruktur dilakukan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Dalam konteks Indonesia, durasi tender yang singkat bukan hal yang aneh karena ada metode tender cepat yang mana salah satu syaratnya adalah penyedia telah terdaftar dalam SIKAP dan sudah memiliki pengalaman mengerjakan proyek serupa sebelumnya. Dalam hal ini, periode tender yang lebih lama memungkinkan negosiasi yang lebih lama dan lebih rentan terhadap korupsi.

Karena kurangnya data tentang periode penawaran, analisis rinci tentang lamanya proses evaluasi atau seleksi tidak dapat dilakukan. Pemerintah perlu membuka lebih banyak data pengadaan. Pemerintah perlu membuka lebih banyak data pengadaan, sebab setiap metode pengadaan memiliki durasi yang berbeda. Namun, penelitian ini hanya fokus pada data tender (berdasarkan ketersediaan data yang ada di Opentender). Dengan demikian, tidak mungkin untuk menghitung durasi tender berdasarkan metode pengadaannya. ICW mengembangkan perhitungan resiko yang berbeda untuk metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung (data non-tender) yang mulai digunakan pada akhir tahun 2021.

<sup>24</sup>Opentender. Diakses pada 13 Januari 2021

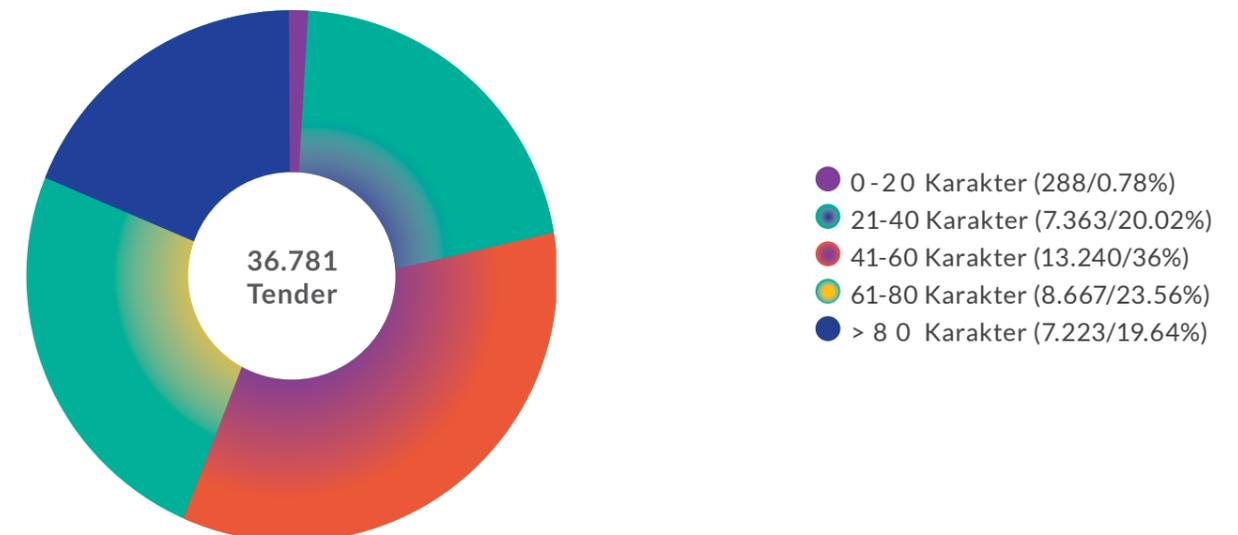
Selain metode pengadaan, durasi mungkin juga dipengaruhi oleh banyak variabel lain, termasuk ukuran dan kematangan lembaga pengadaan, metode seleksi, metode evaluasi, apakah entitas pengadaan menggunakan sistem mereka sendiri atau meminjam sistem dari pihak lain. Karena variabilitas yang besar, Opentender tidak lagi membedakan durasi rata-rata selain tender dan non tender.

## Integritas Publik

- Persentase Tender dengan Judul Kurang dari 20 Karakter

Indikator pada 'Tender dengan Kurang dari 20 Karakter' dibuat berdasarkan rata-rata jumlah karakter judul terpendek dari tender antara 2010 hingga 2020

Grafik 1.9. Persentase Tender dengan Judul Kurang dari 20 Karakter pada 2020



Sumber: Opentender<sup>25</sup>

Dari 36.781 tender (0,78%) terdapat 288 judul dengan 0-20 karakter. Misalnya, "Sungai Cipelang" (Sungai Cipelang), DI. Ciputrahaji, "Pemagaran Kebun", "Pembangunan RKB" (Konstruksi NCR) atau "Penataan Koleksi Nisan dan Meriam" (Batu Nisan dan Penataan Koleksi Canon).

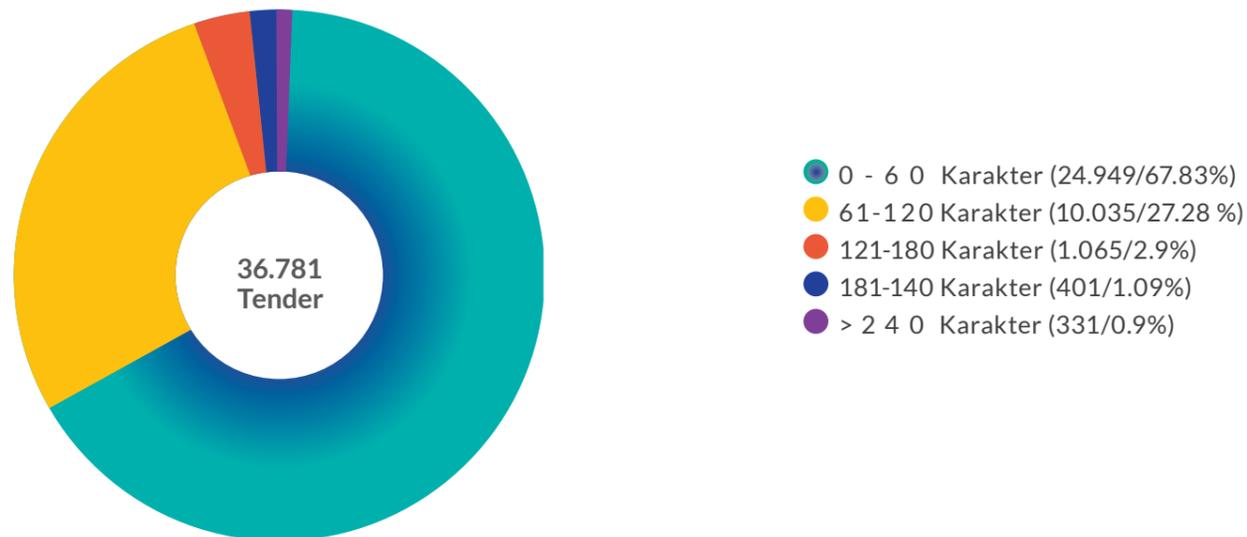
Sebanyak 7.223 tender (19,54%) sudah menyediakan judul yang cukup panjang dengan lebih dari 80 karakter. Judul tender yang singkat atau non-deskriptif mengurangi kesempatan bagi calon penawar untuk menemukan dan memahami pengumuman tender.

<sup>25</sup>Opentender. Diakses pada 13 Januari 2021

- **Persentase Jumlah Tender dengan Deskripsi kurang dari 60 Karakter**

Indikator 'Tender dengan Deskripsi Kurang dari 60 Karakter' ini diambil berdasarkan rata-rata jumlah karakter judul terpendek dari tender antara tahun 2010 hingga 2020.

Grafik 1.10. Persentase Tender dengan Deskripsi Kurang dari 60 Karakter pada 2020



Sumber: Opentender<sup>26</sup>

Ada 24.949 tender atau sekitar 67,83% tender dengan deskripsi singkat (0-60 karakter). Misalnya, "pemasangan dan pengecatan", perbaikan atap dan plafon", "pekerjaan arsitektur", "pembangunan drainase", atau "penataan nisan dan meriam" (pengaturan batu nisan dan kanon). Deskripsi tender yang singkat atau non deskriptif mengurangi kesempatan bagi calon penawar untuk menemukan dan memahami pengumuman tender.

Pada saat yang sama, hanya ada 331 tender atau sekitar 0,9% tender yang memiliki deskripsi lebih dari 240 karakter. Namun, perlu dilakukan analisis lebih lanjut apakah uraian panjang tersebut akan membantu calon penyedia untuk mengikuti tender. Sebagai contoh,

"Kebutuhan jasa transportasi sebagai hasil capaian dari upaya pembangunan yang dilakukan selama ini harus diantisipasi dengan baik dengan meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana transportasi yang memadai;

<sup>26</sup>Opentender. Diakses pada 13 Januari 2021

Tujuan pembangunan transportasi pada pembangunan jalan adalah untuk mendukung tercapainya perekonomian yang mandiri dan andal melalui penyelenggaraan sistem transportasi sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan peran sistem transportasi yang baik dalam memenuhi kebutuhan mobilitas manusia, barang dan jasa. dan mewujudkan sistem transportasi nasional yang efisien.

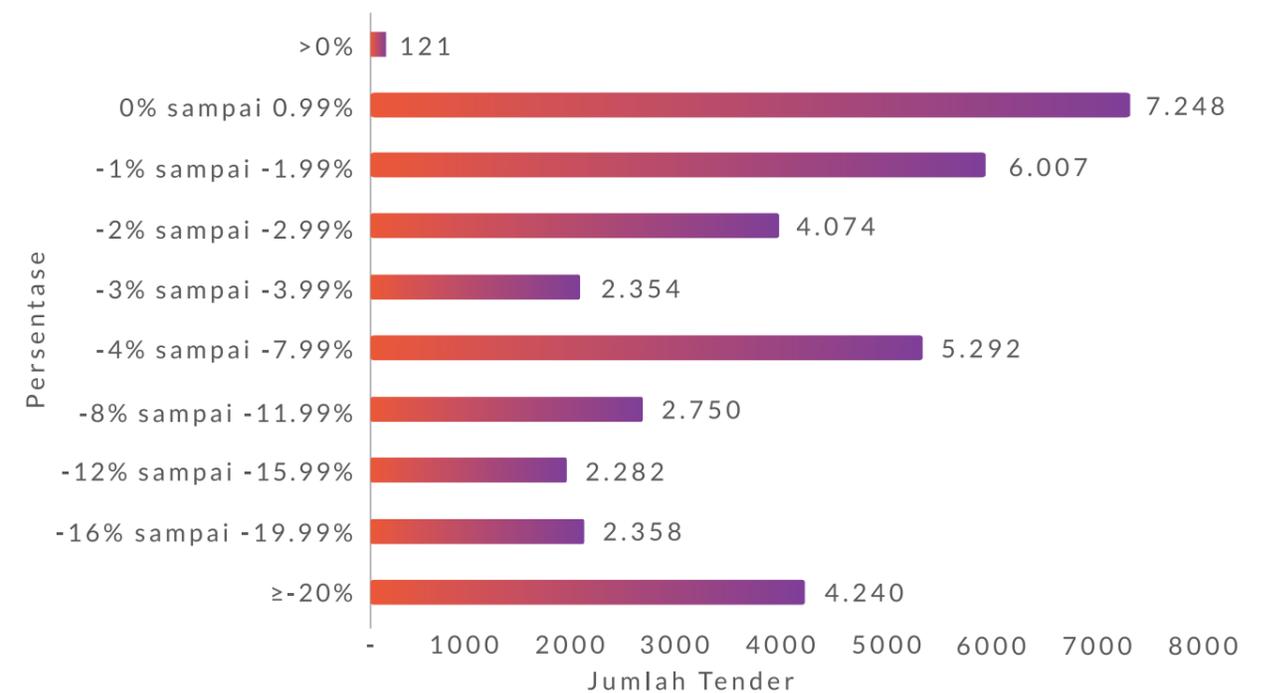
Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian sektor lain yang mengarah pada sistem transportasi antar kota yang terintegrasi untuk mencapai sistem distribusi yang baik. Pembangunan sektor jalan di suatu daerah tidak lepas dari peran masyarakat dari yang sederhana hingga peran yang baik."

Kesimpulannya, untuk meningkatkan analisis integritas publik, LKPP perlu meningkatkan kualitas data dengan menambahkan penjelasan judul dan deskripsi yang lebih lengkap untuk mendorong penyedia berpartisipasi

### Value for Money

- **Persentase Nilai Kontrak dan HPS**

Grafik 1.11 Persentase Nilai Kontrak dan HPS pada 2020



Sumber: Opentender<sup>27</sup>

<sup>27</sup>Opentender. Diakses pada 20 Januari 2021

Grafik di atas menunjukkan persentase nilai kontrak di atas HPS (overruns) dan persentase nilai kontrak di bawah HPS (penghematan). Persentase overrun (merah) adalah tender dengan nilai kontrak di atas HPS. Sedangkan persentase penghematan (hijau) pada indikator ini adalah tender dengan nilai kontrak di bawah HPS.

Terdapat 0,3% (121 tender dari 36.726) yang mengalami overrun. Dalam hal penghematan, 19,7% tender memiliki penghematan kurang dari 1%, sedangkan 11,5% memiliki penghematan lebih dari 20%.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai kontrak infrastruktur sangat sedikit selisihnya dengan nilai HPS. Ini dapat dianalisis lebih lanjut karena berpotensi mengarah pada penyimpangan.

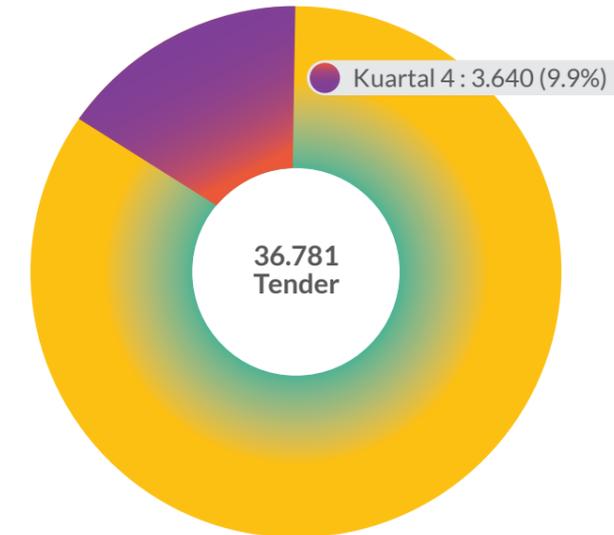
Namun, tingginya angka penghematan tidak dapat diartikan sebagai cerminan dari proses pengadaan yang menjadi lebih efisien karena nilai kontrak yang jauh di bawah nilai HPS juga dapat mengindikasikan masalah perencanaan hingga potensi penyimpangan

### Indikator Tambahan untuk Tanda Bahaya (Red Flag)

- Pengadaan di Kuartal Keempat

Berdasarkan indikator ICW, proses pengadaan yang dimulai pada kuartal keempat menunjukkan proses pengadaan yang terburu-buru. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan upaya untuk memaksimalkan pengeluaran tanpa persiapan yang matang dan akan mengakibatkan kualitas yang rendah, bahkan terkadang pekerjaan yang tidak selesai atau fiktif. Indikator ini digunakan dalam Analisis Potensi Kecurangan di Opentender dan berdasarkan analisis kasus korupsi yang dilaporkan ke ICW sejak tahun 2004. Di bawah ini adalah tender infrastruktur yang dilakukan pada kuartal keempat tahun 2020.

Grafik 1.12. Persentase Tender di Kuartal Keempat



Sumber: Opentender<sup>28</sup>

Ada 9,9% dari tender (3.640 dari 36.781) yang diumumkan pada kuartal 4 tahun 2020 (Oktober, November, Desember). Sebanyak 3.640 tender tersebut merupakan kontrak tahun tunggal (bukan tahun jamak) dan **bukan** merupakan bagian dari pengadaan yang mendahului tahun anggaran<sup>29</sup> atau Pradipa<sup>30</sup>. **Pengadaan tahun tunggal yang dimulai pada kuartal keempat biasanya memiliki risiko kecurangan yang lebih tinggi<sup>31</sup>.** Proyek pengadaan yang baru dimulai cukup terlambat dalam tahun anggaran sering dianggap sebagai upaya terakhir untuk menghabiskan anggaran yang dialokasikan dan cenderung dilakukan tanpa perencanaan yang matang.

- 10 Tender Infrastruktur dengan Nilai Kontrak Tertinggi

10 besar tender infrastruktur dengan nilai kontrak tertinggi pada tahun 2020 adalah konstruksi jalan raya, infrastruktur sinyal dan komunikasi kereta api, pembangunan stadion, pembangunan jalan, proyek rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan mitigasi banjir, pembangunan fasilitas bandara, pembangunan bendungan, dan pembangunan stasiun pompa air.

<sup>28</sup>Opentender. Diakses pada 20 Januari 2021

<sup>29</sup>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Umum. Pasal 50 ayat 9 dan 10 mengatur: Barang dan jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihannya dapat dilaksanakan setelah:

1. penetapan pagu anggaran kementerian/lembaga; atau
2. Persetujuan RKA perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tender pra-DIPA merupakan tender yang dimulai menjelang tahun anggaran baru. Sebagai gambaran, tender dapat dimulai pada Desember 2020 untuk tahun anggaran 2021.

<sup>30</sup>Pradipa: Pra Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / next year budget)

<sup>31</sup>Opentender. <https://Opentender/#/method/>. Indikator #6.

Tabel. 1.7. 10 Tender Infrastruktur Terbaik dengan Nilai Kontrak Tertinggi 2020

Judul Tender	Penyedia	HPS	Nilai Kontrak	Tanggal Pengumuman	Pagu
PEMBANGUNAN JALAN TOL SERANG - PANIMBANG SEKSI 3 (CILELES-PANIMBANG)	SINO ROAD AND BRIDGE GROUP CO., LTD	Rp4.60 Triliun	Rp4.59 Triliun	06-12-2019	Rp4.60 Triliun
Peningkatan Sistem Persinyalan Dan Telekomunikasi Perkeretaapian Pada Lintas Jatinegara – Bogor Dan Manggarai – Jakartakota MYC 2020-2022 (tender tidak mengikat)	PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)	Rp1.06 Triliun	Rp1.04 Triliun	24-09-2020	Rp1.06 Triliun
Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multi Years)	PT. PP (PERSERO) TBK	Rp944.72 Milyar	Rp874.32 Milyar	07-02-2020	Rp983.00 Milyar
Pembangunan Jalan Kendari - Toronipa	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK	Rp799.26 Milyar	Rp756.90 Milyar	24-01-2020	Rp800.00 Milyar
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok A Kabupaten Kapuas	PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.	Rp808.55 Milyar	Rp738.05 Milyar	23-07-2020	Rp808.55 Milyar
Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 1	PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK	Rp666.90 Milyar	Rp591.66 Milyar	07-09-2020	Rp666.90 Milyar
- Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Siboru Fakfak	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK	Rp604.11 Milyar	Rp572.49 Milyar	03-09-2020	Rp684.78 Milyar
Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Kab. Penajam Paser Utara	PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	Rp676.73 Milyar	Rp556.42 Milyar	27-12-2019	Rp676.73 Milyar
	PT. NINDYA KARYA (PERSERO)	Rp479.56 Milyar	Rp442.29 Milyar	05-05-2020	Rp501.74 Milyar
Pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong	PT. WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK.	Rp497.29 Milyar	Rp437.61 Milyar	30-04-2020	Rp497.29 Milyar

Sumber: Opentender<sup>32</sup><sup>32</sup>Opentender. Diakses pada 2 Februari 2021

HPS infrastruktur tertinggi pada tahun 2020 diberikan kepada Sino Road and Bridge Group Co., Ltd (SRBGC) dengan bentuk perjanjian *joint-venture* dengan dua perusahaan konstruksi Indonesia lainnya. Koalisi ini pertama kali terbentuk pada tahun 2020 dan juga ditemukan analisis pada 10 besar penyedia dengan nilai kontrak tertinggi.

Namun, itu bukan kali pertama SRBGC memenangkan tender yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pada tender lainnya, SRBGC memiliki rekam jejak yang tidak baik. Pada tahun 2017 perusahaan tersebut berhasil memenangkan proyek Tol Manado-Bitung di Sulawesi Utara di mana pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan target. Realisasi fisik hanya 13,47% dari yang disepakati 26,06%. Pembangunan jalan tol juga bermasalah karena keterlambatan pembayaran kepada subkontraktor.<sup>33</sup>



## Rekomendasi

### Meningkatkan Ketersediaan Data

Agar dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif berdasarkan Indikator OC4IDS, rekomendasi utama adalah mengumpulkan/membuka data/informasi berikut:

1. Menambahkan kode pengidentifikasi proyek (*project identifier*) yang menghubungkan antara pengadaan infrastruktur dengan jasa konsultasi di proyek infrastruktur yang sama.
2. Mengumpulkan dan menyimpan data penawar dari sistem LKPP dan membukanya untuk memungkinkan pengukuran nilai manfaat uang dan aspek implementasi.
3. Mengumpulkan dokumen terkait implementasi dan evaluasi dari sistem LKPP untuk memungkinkan pengukuran efisiensi dan aspek implementasi.

**Kode pengidentifikasi proyek (*project identifier*)** diperlukan untuk analisis menyeluruh pada proyek infrastruktur. Ketika informasi tersebut dibuka, akan dapat menganalisis *nilai manfaat uang* tentang bagaimana kontrak diberikan apakah itu adalah penawaran terendah. Selain itu, kode pengidentifikasi proyek berguna untuk menganalisis implementasi tentang berapa banyak lembaga maupun penyedia berbeda yang terlibat dalam satu proyek infrastruktur. Ini adalah penandaan khusus yang menghubungkan kontrak pengadaan yang berbeda di bawah satu proyek. Misalnya, kontrak pembangunan jalan, kontrak konsultasi kelayakan, dan kontrak jasa pengawasan dilabeli dalam satu proyek. Hal ini memungkinkan analisis menyeluruh pada setiap proyek infrastruktur.

Catatan lain, **dokumen kunci terkait implementasi dan evaluasi** tersedia secara offline. Perlu untuk memublikasikan informasi secara daring untuk dapat menganalisis efisiensi apakah ada kelebihan waktu yang signifikan, apakah ada biaya eksternal/tambahan yang tidak terduga/memperburuk yang berkaitan dengan proyek, kemajuan fisik proyek, jumlah variasi (modifikasi) yang dimiliki proyek dan ruang lingkupnya.

<sup>33</sup>ICW. 2022. Analisis 10 tahun reformasi pengadaan publik

<https://antikorupsi.org/en/article/a-decade-of-e-procurement-in-indonesia>. Diakses pada 9 Maret 2022

Akan bermanfaat juga jika pemerintah mulai mengumpulkan/menyusun **Kode Pengeluaran**. Ini adalah penandaan khusus untuk jenis pengeluaran konstruksi (yaitu jalan, rumah sakit, sekolah). Misalnya, akan berguna untuk melakukan analisis komparatif terhadap pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah.

Silakan lihat juga Lampiran 9 untuk melihat detail dari tiga data tambahan yang diperlukan di atas.

Untuk analisis proyek infrastruktur yang lebih komprehensif, akan berguna juga untuk memulai pengumpulan data yang dirinci dalam 'kasus penggunaan' lembar kasus penggunaan OC4IDS, kolom J & K.

Selain itu, berikut juga rekomendasi utama bagi LKPP untuk menyediakan data terkait berdasarkan **Red flags OCDS** :

1. Untuk mengumpulkan dan membuka dokumen perencanaan pengadaan, termasuk Rencana Umum Pengadaan, kerangka acuan dan spesifikasi teknis, rancangan kontrak, serta dokumen persyaratan.
2. Menambahkan fitur dalam sistem SPSE yang mengharuskan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah mengumpulkan dokumen yang terkait dengan implementasi (termasuk dokumen kontrak, tanggal mulai kontrak, nama penyedia, kemajuan kontrak, pembayaran) dan membuatnya tersedia secara daring, kemudian membuka informasi tersebut kepada publik.
3. Menambahkan fitur dalam sistem SPSE yang mengharuskan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah untuk mengumpulkan dalam bentuk digital dokumen-dokumen terkait evaluasi (termasuk sertifikat evaluasi, tanggal dan bukti serah terima pekerjaan), kemudian membuka informasi tersebut kepada publik.
4. Menyiapkan struktur data dan membuat standar untuk semua informasi terkait penyedia yang berpartisipasi dalam pengadaan publik yang terdaftar dalam sistem manajemen penyedia.

Silakan lihat Lampiran 10 untuk rincian tentang 4 data yang diperlukan. Kajian ini juga mendorong LKPP untuk memublikasikan lebih banyak data dan informasi yang terinci dalam **Red Flags to OCDS Mapping** seperti yang ada pada kolom E pada lembar 'master'.

**Efisiensi internal.** Selain itu, tidak adanya kategori penyebab tender gagal menjadi tantangan dalam analisis lebih lanjut. Direkomendasikan agar LKPP meningkatkan ketersediaan data termasuk, namun tidak terbatas pada, memberikan kategori alasan pembatalan tender.

## Meningkatkan Pengungkapan Data

Pemerintah sudah menyediakan sistem dan informasi pengadaan secara daring, namun belum sepenuhnya dapat dibaca oleh publik secara terbuka dalam format *machine-readable*. Saat ini terdapat 657 lembaga pengadaan dengan sistem sendiri dengan banyak data yang tidak dikumpulkan secara terpusat karena kurangnya sumber daya/infrastruktur di LKPP untuk mengumpulkan dan menyimpannya, khususnya *dataset* peserta tender. Beberapa kumpulan data lainnya sedang dalam proses untuk diintegrasikan dalam Opentender MoU dengan LKPP.

Laporan ini mendorong LKPP untuk mengungkapkan data berikut:

1. Data dari metode e-purchasing, penunjukan langsung dan pengadaan langsung<sup>34</sup>
2. Semua informasi terkait penyedia yang berpartisipasi dalam pengadaan publik yang terdaftar dalam SIKAP. Informasi ini mencakup informasi yang dapat diakses oleh publik (mis. nama penyedia) yang tersedia dalam format teks dan informasi yang tidak dapat diakses oleh publik (mis. kinerja penyedia).
3. Peserta tender dan nilai penawarannya.
4. Tanggal kontrak

Data dari SIKAP tersedia secara daring namun ICW belum menerima akses ke data ini. Untuk beberapa indikator lain seperti peserta tender, dan nilai penawaran, tidak dikumpulkan oleh LKPP dari masing-masing lembaga pengadaan karena kekurangan infrastruktur data dan sistem informasi serta tenaga kerja. Silakan lihat Lampiran 11 untuk rincian lebih lanjut tentang 4 data tambahan yang diperlukan.

**Klasifikasi penyedia.** Saat menghitung kompetisi pasar, penelitian ini juga tidak dapat menganalisis jenis penyedia baru yang berpartisipasi dalam pengadaan publik karena kurangnya data. Studi ini merekomendasikan perbaikan pengungkapan data dari LKPP pada data yang tersedia dalam SIKAP, termasuk tetapi tidak terbatas pada jenis penyedia yang berpartisipasi untuk analisis yang lebih baik (yaitu BUMN, Usaha Kecil dan Menengah, dan/atau skala usaha, bisnis milik kelompok perempuan, dll).

**Indikator red flag tambahan.** Studi ini juga tidak dapat menganalisis lebih lanjut tentang rekam jejak perusahaan yang meraih nilai kontrak tertinggi karena kurangnya pengungkapan data. Studi ini merekomendasikan peningkatan pengungkapan data dari LKPP pada data yang tersedia di SIKAP termasuk namun tidak terbatas pada riwayat kinerja penyedia untuk analisis yang lebih baik.

<sup>34</sup>Per 20 Desember 2021, data ini telah diungkapkan dan dapat diakses oleh LKPP

## Meningkatkan Kualitas Data

Upaya pengumpulan beberapa data pengadaan telah dimulai dan dapat diakses oleh Opentender. Namun, kualitasnya masih perlu ditingkatkan oleh LKPP untuk analisis yang lebih baik, seperti:

1. Informasi yang tersedia pada Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP) seperti detail pekerjaan, volume pekerjaan, dan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Informasi yang tersedia pada sistem e-procurement (LPSE) seperti penyedia yang dikontrak dan hasil evaluasi pada proses seleksi
3. Alasan/penjelasan mengapa suatu tender dibatalkan

Semua informasi yang tersedia pada sistem pemantauan Realisasi Anggaran (Monev Tepra) mengenai proses pengadaan.

**Efisiensi Internal.** Kajian ini juga belum bisa memberikan analisis lebih lanjut mengenai alasan tender gagal karena kurangnya ketersediaan data. Data yang tersedia saat ini hanya dalam format teks di mana sebagian besar informasi tidak lengkap/kosong. Direkomendasikan agar LKPP meningkatkan kualitas data, termasuk namun tidak terbatas pada pengaturan standar penjelasan tentang tender yang dibatalkan.

**Integritas Publik.** Judul dan deskripsi tender yang singkat atau non-deskriptif mengurangi kesempatan bagi calon penawar untuk menemukan dan memahami pengumuman tender. Disarankan agar instansi pemerintah (baik di tingkat pusat maupun daerah) meningkatkan kualitas datanya dengan menambahkan penjelasan judul dan deskripsi yang lebih lengkap guna mendorong penyedia untuk berpartisipasi.

Silakan lihat Lampiran 11 untuk rincian tentang data yang diperlukan untuk perbaikan.

## Penelitian/ Analisis Lebih Lanjut.

**Persaingan pasar berfokus pada BUMN.** Studi ini menemukan bahwa 10 proyek infrastruktur teratas pada tahun 2020 dikontrakkan kepada Badan Usaha Milik Negara. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji kompetisi pasar di sektor tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada minat untuk berpartisipasi dan kapasitas perusahaan konstruksi swasta.

**Manfaat Nilai Uang.** Studi ini menemukan bahwa tingginya tingkat penghematan dalam tender infrastruktur tidak dapat diartikan sebagai cerminan dari proses pengadaan yang menjadi lebih efisien karena nilai kontrak yang jauh di bawah HPS juga dapat menunjukkan masalah perencanaan hingga potensi penyimpangan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan standar penghematan yang tidak berpotensi penyimpangan dan untuk mengkaji lebih lanjut kebijakan penganggaran dan pengeluaran Indonesia.



## Lampiran

### Lampiran 1.1

#### Rincian kasus penggunaan OC4IDS yang diterapkan di Opentender

Berdasarkan data yang tersedia di Indonesia, terdapat 3 dari 29 *use case* di OC4IDS *use case* yang berlaku untuk data Opentender. empat kasus penggunaan diterapkan ke dasbor infrastruktur dan/atau analitik *red flag* di Opentender, yaitu:

- Pemenang berulang untuk mengukur kompetisi.
  - Indikator ini diterapkan untuk analitik *red flag* sebagai salah satu dari 7 indikator di Opentender.
- Jenis pengadaan, antara tender dan non-tender, untuk mengukur kompetisi di masing-masing jenis.
  - Dua set data ini tersedia di Opentender dan diterapkan untuk visualisasi dasbor nasional. Namun, dalam konteks Indonesia, analitik untuk visualisasi dashboard infrastruktur tidak termasuk non-tender karena datanya tidak tersedia selama pengembangan. Visualisasi untuk data infrastruktur non-tender selesai dikembangkan pada bulan November 2021.
  - Selama penulisan penelitian, hanya data tender yang digunakan untuk analitik *red flag*. *Red flag* untuk data non-tender akan dianalisis secara terpisah dan akan menggunakan serangkaian indikator yang berbeda. Analisis (data non-tender) diharapkan selesai pada September 2021 juga.
- HPS vs nilai kontrak untuk mengukur nilai uang. Indikator ini diterapkan untuk analitik *red flag* sebagai salah satu dari 7 indikator di Opentender.

ID	Topik	Pertanyaan	Pernyataan
U3	Persaingan	Siapa yang berulang kali memenangkan kontrak?	Ini dapat dihitung dengan menganalisis <i>ID penyedia</i>
U7	Persaingan	Bagaimana proses pengadaannya? Pengadaan langsung? Tender kompetitif?	Di Opentender, saat ini hanya ada 2 dari 5 metode pengadaan di Indonesia yang tersedia: <i>Pembelian elektronik (t/a)</i> <i>penunjukan langsung (t/a)</i> <i>pengadaan langsung (t/a)</i> <i>tender</i> <i>tender cepat</i>

ID	Topik	Pertanyaan	Pernyataan
U8	Value for Money	Berapa HPS vs nilai kontrak?	Ini dapat dihitung di tingkat proyek dengan membandingkan HPS (dari data LKPP) dan nilai kontrak (dari data LKPP yang terakhir diperbarui tentang pemenang tender dan negosiasi) <sup>35</sup> .

### Lampiran 1.2

#### Rincian indikator OC4IDS yang diterapkan dalam Opentender

Lampiran 1.2 - Rincian indikator OC4IDS yang diterapkan dalam Opentender

ID	Topik	Pertanyaan	Indikator pada Opentender
U1	efisiensi	Apakah ada pembengkakan biaya yang signifikan?	<i>HPS (perkiraan pemilik) nilai kontrak</i>
U3	kompetisi	Siapa yang berulang kali memenangkan kontrak?	<i>10 penyedia teratas dengan jumlah kontrak kontrak tertinggi</i>
U3	kompetisi	Siapa yang berulang kali memenangkan kontrak?	<i>10 penyedia teratas dengan jumlah kontrak kontrak tertinggi</i>
U8	Manfaat nilai uang	Berapa nilai kontrak vs HPS?	<i>HPS (harga perkiraan sendiri) nilai penghargaan</i>

<sup>35</sup>HPS dalam konteks ini adalah Harga Perkiraan Sendiri yang disusun oleh Panitia Pengadaan. Nilai kontrak adalah harga akhir yang terakhir diperbarui dari proses penawaran dan negosiasi yang menang.

## Lampiran 2.1

### Indikator Terapan dari *Template* Pemetaan OCDS Redflags

Ada 3 dari 119 indikator di *template Redflags* ke OCDS Mapping yang tersedia di Opentender. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai referensi untuk mengembangkan secara khusus dan untuk menentukan informasi apa yang akan ditampilkan di dashboard Infrastruktur. 3 indikator *red flag* adalah:

1. *Item* baris yang terlalu rendah
2. *Item* baris yang terlalu tinggi
3. Tawaran terlalu dekat dengan anggaran, perkiraan, atau solusi pilihan

Studi ini menemukan bahwa keterbatasan untuk menggunakan lebih banyak indikator terutama karena kurangnya data yang tersedia di Indonesia. Oleh karena itu, hanya ada 3 indikator yang bisa diterapkan pada Opentender.

ID	Fase	Redflag	Sumber Data yang Digunakan
F007	Tender	<i>Item</i> baris yang terlalu rendah	HPS Nilai Kontrak
F010	Tender	Tawaran <i>item</i> baris yang terlalu tinggi	HPS Nilai Kontrak
F050	Tender	Tawaran terlalu dekat dengan anggaran, perkiraan, atau solusi pilihan	HPS Nilai Kontrak

Untuk informasi lebih lanjut, lihat lembar 'Master'.

## Lampiran 2.2

### Indikator Tambahan\* pada Opentender Tidak Tersedia di *Template* Pemetaan Redflags OCDS

Fase	Redflags	Sumber Data yang Digunakan	Penjelasan
Kontrak	Nilai kontrak yang lebih tinggi mewakili risiko yang lebih tinggi	nilai kontrak	Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi risikonya
Kontrak	Penghematan nilai kontrak yang rendah dari HPS (perkiraan pemilik)	nilai kontrak: HPS	Semakin kecil perbedaannya, semakin tinggi risikonya
Kontrak	Anggaran terburu-buru untuk memaksimalkan pengeluaran di akhir tahun anggaran	Tanggal Pengumuman Tender Oktober hingga Desember	Semakin kecil perbedaannya, semakin tinggi risikonya

\*) lihat lembar 'indikator tambahan dari ICW'

### Lampiran 3

Indikator yang Digunakan pada Opentender dari *the Use-Case Guide Linked to OCDS*

Kelompok	Indikator	Pernyataan	Dashboard
Peluang Pasar	Persentase kontrak yang diberikan kepada 10 penyedia teratas dengan total kontrak terbesar	Persentase 10 penyedia teratas dengan total kontrak terbesar	National Infrastructure Covid
Peluang Pasar	Jumlah penyedia baru yang diberikan	Jumlah penyedia baru yang diberikan	National Infrastructure Covid
Peluang Pasar	Persentase penghargaan yang diberikan kepada penyedia baru	Persentase penghargaan yang diberikan kepada penyedia baru	National Infrastructure Covid
Peluang Pasar	Total nilai yang diberikan kepada penyedia baru	Total nilai yang diberikan kepada penyedia baru	National Infrastructure Covid
Peluang Pasar	Persentase penyedia baru terhadap semua penyedia	Persentase penyedia baru ke semua penyedia	National Infrastructure Covid
Peluang Pasar	Konsentrasi pasar (pangsa pasar perusahaan terbesar di pasar)	Konsentrasi pasar (pangsa pasar perusahaan terbesar di pasar)	National Infrastructure Covid
Publik Integrity	Persentase tender dengan judul kurang dari 10 karakter*	Indikator disesuaikan dari 10 karakter menjadi 20 karakter. Angka '20' ini berasal dari rata-rata jumlah karakter dalam data opentender 2011-2020.	National Infrastructure Covid
Publik Integrity	Persentase tender dengan kurang dari 30 karakter dalam deskripsi*	Indikator disesuaikan dari 30 karakter menjadi 60 karakter. Angka '60' ini berasal dari rata-rata jumlah karakter dalam data opentender 2011-2020.	National Infrastructure Covid
Publik Integrity	Persentase tender yang tidak menyertakan kode item rinci atau deskripsi item	Jumlah Tender Berdasarkan Jenis Pengadaan	National Infrastructure Covid

Kelompok	Indikator	Pernyataan	Dashboard
Internal Efficiency	Lamanya masa tender (hari)	Durasi antara tanggal pengumuman tender dan tanggal pemberian tender	National Infrastructure Covid
Internal Efficiency	Persentase tender yang dibatalkan ke tender yang diberikan	- Jumlah tender yang dibatalkan - Jumlah tender yang diberikan	National Infrastructure Covid
Value for Money	Persentase kontrak yang melebihi anggaran	HPS vs Nilai penghargaan	National Infrastructure Covid
Value for Money	Total persen penghematan	HPS vs Nilai kontrak	National Infrastructure Covid

\*) Indikator disesuaikan berdasarkan analisis konteks Indonesia

### Lampiran 4

Tender Triwulan IV di Semua Tingkat Pemerintahan Tahun 2011 - 2020<sup>36</sup>

Tahun Anggaran	Konsultasi	Layanan Lainnya	Pembangunan	Barang	Total
2011	62	93	255	1,025	1,435
2012	85	221	687	1,707	2,700
2013	212	456	733	2,968	4,369
2014	163	390	682	2,715	3,950
2015	580	542	1,123	2,705	4,950
2016	626	290	1,078	1,727	3,721
2017	577	416	1,465	1,460	3,918
2018	166	383	986	1,879	3,414
2019	68	204	753	1,532	2,557
2020	198	179	1,074	2,304	3,755
Total	2,737	3,174	8,836	20,022	34,769

<sup>36</sup>ICW. 2022. Analisis 10 tahun reformasi pengadaan publik

<https://antikorupsi.org/en/article/a-decade-of-e-procurement-in-indonesia>

## Lampiran 5

10 Penyedia Teratas dengan Nilai Kontrak di seluruh tingkat Pemerintahan pada 2011 - 2020<sup>37</sup>

Penyedia	Jumlah Tender	Nilai Total Value (dalam triliun rupiah)	Tersangka/Saksi
PT. NINDYA KARYA (Persero)	196	25.08	Tersangka Perusahaan dalam Konstruksi Loading Dock di Pelabuhan Sabang
PT. Waskita Karya (Persero)	161	23.34	Tersangka dalam proyek fiktif
PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk	169	21.33	Tersangka dalam pembangunan IPDN di Minahasa, Sulawesi Utara
PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.	68	19.11	Tersangka dalam kasus Waterfront
PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	95	16.01	Saksi Pelatihan Pembangunan Rumah Sakit dan Alat Kesehatan Universitas Airlangga
PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	86	14.21	Tersangka dalam kasus Sorong Training Center (2011) Saksi dalam kasus Waterfont
PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)	106	13.85	Tersangka penggelapan
PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk	24	9.62	Saksi Pembangunan Rumah Sakit Diklat Universitas Udayana in Udayana University
PT. Brantas Abipraya (Divisi 2)	15	6.85	Tersangka penggelapan
PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	39	5.83	Saksi dalam subkontrak fiktif oleh Waskita Karya

<sup>37</sup>ICW. 2022. Analisis 10 tahun reformasi pengadaan publik

<https://antikorupsi.org/en/article/a-decade-of-e-procurement-in-indonesia>

## Lampiran 6

10 Penyedia Teratas Pekerjaan Konstruksi di Semua Tingkat Pemerintahan Tahun 2011 - 2020<sup>38</sup>

Jumlah Kontrak			Jumlah Kontrak		
Penyedia	Kontrak	Nilai Total (Rp Milyar)	Penyedia	Kontrak	Nilai Total (Rp Milyar)
PT. NINDYA KARYA (Persero)	196	25,079.87	PT. NINDYA KARYA (Persero)	196	25,079.87
PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk	162	21,083.52	PT. Waskita Karya (Persero)	159	23,277.33
PT. Waskita Karya (Persero)	159	23,277.33	PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk	162	21,083.52
CV. RIAPRIMA PUTRI AMBAR	147	158.9595	PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk	68	19,112.53
PT. NAMBUR MARLATA	129	139.6484	PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	92	15,923.63
PT. ARMADA HADA GRAHA	116	1,097.113	PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	86	14,207.06
PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)	106	13,852.95	PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)	106	13,852.95
CV INSUN MEDAL LESTARI	96	83.70786	PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk	24	9,616.305

<sup>38</sup>ICW. 2022. Analisis 10 tahun reformasi pengadaan publik

<https://antikorupsi.org/en/article/a-decade-of-e-procurement-in-indonesia>

Jumlah Kontrak			Jumlah Kontrak		
Penyedia	Kontrak	Nilai Total (Rp Milyar)	Penyedia	Kontrak	Nilai Total (Rp Milyar)
PT. SANUR JAYA UTAMA	95	838.5166	PT. Brantas Abipraya (Divisi 2)	15	6,850.402
PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	92	15,923.63	PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	39	5,828.594

### Lampiran 7

Tender dengan Nilai Penghargaan Tertinggi di Semua Tingkat Pemerintahan di 2011-2010<sup>38</sup>

Tahun Anggaran	Judul Tender	Tipe Pengadaa	Entitas Pengadaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)
2011	Pembangunan Jalan Samarinda - Sanga-sanga (TPK Palaran)	Pekerjaan Konstruksi	-	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TB PEMBANGUNAN PERUMAHAN CABANG VI KALIMANTAN	358,542,333,000
2012	Pengadaan Vaksin Reguler	Pengadaan Barang	Kementerian Kesehatan	PT. BIO FARMA	564,074,280,418
2013	Investor dan Operator Bus Untuk Koridor 2 dan 3 Transjakarta Busway Tahap 2	Jasa Lainnya	-	PRIMA LESTARI WISATA	1,140,183,012,276

<sup>38</sup>ICW. 2022. Analisis 10 tahun reformasi pengadaan publik

<https://antikorupsi.org/en/article/a-decade-of-e-procurement-in-indonesia>

Tahun Anggaran	Judul Tender	Tipe Pengadaa	Entitas Pengadaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)
2014	Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Manggarai s/d Jatinegara "Pekerjaan Sipil" (tidak mengikat)&#xd;	Pekerjaan Konstruksi	-	PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	1,019,528,521,000
2015	Pengadaan Pesawat Latih Sayap Tetap Single Engine	Pengadaan Barang	Kementerian Perhubungan	PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)	637,230,000,000
2016	Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Terintegrasi Rancang Bangun Pembangunan Stadion Utama Provinsi Papua	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Papua	PT. PP (PERSERO) TBK	1,392,477,000,000
2017	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu Phase III	Pekerjaan Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION	2,237,279,489,422
2018	Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Paket 4 (MYC)	Pekerjaan Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PT. BRANTAS ABIPRAYA (DIVISI 2)	1,372,371,000,000
2019	Pembangunan Bendungan Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah	Pekerjaan Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	1,029,707,800,076

Tahun Anggaran	Judul Tender	Tipe Pengadaa	Entitas Pengadaan	Penyedia	Nilai Kontrak(Rp)
2020	Pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi 3 (Cileles-Panimbang)	Pekerjaan Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SINO ROAD AND BRIDGE GROUP CO., LTD	4,585,032,615,891

### Lampiran 8

Instansi Pemerintah dengan HHI lebih dari 4000

No	Entitas Pengadaan	HHI	Pernyataan
1	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	10,000	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
2	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	10,000	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
3	Badan Pengadaan Umum Nasional	10,000	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
4	Perum Perhutani	10,000	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
5	PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut	10,000	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
6	Dewan Perwakilan Daerah	10,000	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
7	Kabupaten Malaka	10,000	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
8	Kabupaten Muna Barat	10,000	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
9	Kabupaten Puncak	10,000	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
10	Kota Kendari	7,306.76	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)

No	Entitas Pengadaan	HHI	Pernyataan
11	Kabupaten Tegal	7,060.67	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
12	Kabupaten Badung	6,913.19	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
13	Institut Penerbangan dan Antariksa Nasional	6,726.54	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
14	Mahkamah Konstitusi	6,337.22	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
15	Kementerian Dalam Negeri	6,309.5	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
16	Kabupaten Melawi	6,299.3	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
17	Badan Tenaga Nuklir Nasional	6,158.98	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
18	Lembaga Penyiaran Radio	6,024.77	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
19	Kabupaten Indragiri Hilir	5,975.6	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
20	Kabupaten Lampung Utara	5,956.08	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
21	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5,853.13	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
22	Dewan Olahraga Nasional	5,736.83	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
23	Kota Cilegon	5,701.14	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
24	Kabupaten Jayawijaya	5,522.95	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
25	Majelis Permusyawaratan Rakyat	5,420.64	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
26	Kabupaten Karanganyar	5,353.86	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)

No	Entitas Pengadaan	HHI	Pernyataan
27	Lembaga Penyiaran Publik Televisi	5,278.8	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
28	Badan Keamanan Laut	5,227.52	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
29	Kabupaten Fak-Fak	4,886.22	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
30	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	4,727.99	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
31	Kabupaten Gayo Lues	4,703.65	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
32	Kabupaten Sumbawa Barat	4,552.2	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
33	Kota Pekanbaru	4,518.75	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
34	Kejaksaan Agung	4,437.86	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
35	Provinsi Banten	4,417.31	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
36	Kabupaten Belitung Timur	4,204.48	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
37	Kabupaten Bangka Selatan	4,059.7	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
38	Kota Batu	4,055.22	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
39	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	4,026.99	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
40	Kabupaten Kepulauan Sangihe	4,009.81	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)
41	Kota Cirebon	4,003.97	Pasar sangat terkonsentrasi (tidak kompetitif)

## Lampiran 9

### Data Tambahan Diperlukan untuk Analisis Redflags

#### Infrastruktur Berdasarkan Indikator Kasus Penggunaan OCDS

ID	Topik	dikumpulkan / ditambahkan Informasi untuk / diungkapkan	Pernyataan
All		Pengidentifikasi Proyek	Saat ini, tidak ada pengidentifikasi proyek yang terkait dengan proyek infrastruktur
U10 U28	Implementasi Value for money	Penawar	Data hanya tersedia di masing-masing lembaga secara daring dalam format teks dan tidak dapat diunduh - termasuk, namun tidak terbatas pada setiap nama perusahaan penawaran, nilai penawaran, pendaftaran perusahaan. Saat ini, LKPP hanya menyediakan data pemenang lelang.
U2 U16 U22 U26	Implementasi Efisiensi	Dokumen yang terkait dengan implementasi Dokumen yang terkait dengan evaluasi	Data hanya tersedia di masing-masing agensi secara luring

Ini bukan satu-satunya informasi yang diperlukan untuk analisis proyek infrastruktur yang lebih baik. Untuk rekomendasi lebih rinci, silakan lihat lembar 'kasus penggunaan' kolom J & K.

## Lampiran 10

### Data Tambahan yang Diperlukan untuk Analisis Redflags Infrastruktur Berdasarkan Pemetaan OCDS Redflags

Fase	Data yang Dibutuhkan	Data Yang Tersedia Saat Ini dari Pemerintah
Perencanaan	Dokumen perencanaan pengadaan	Tidak ada dokumen yang diterbitkan. Satu-satunya data yang tersedia adalah item baris di Sistem Perencanaan Pengadaan / SIRUP.
Implementasi	Dokumen yang terkait dengan implementasi (termasuk dokumen kontrak, tanggal mulai kontrak, nama vendor, kemajuan kontrak, pembayaran)	Tidak ada data yang tersedia secara daring. Data tersedia secara luring sebagai dokumen <i>hardcopy</i> .
Evaluasi	Dokumen terkait evaluasi (termasuk sertifikat evaluasi, dan tanggal serta bukti serah terima pekerjaan)	Tidak ada data yang tersedia secara daring. Data tersedia secara luring sebagai dokumen <i>hardcopy</i> .
Kontrak Tender Penerapan Evaluasi	Semua informasi terkait penyedia yang berpartisipasi dalam pengadaan publik terdaftar dalam SIKAP. Informasi ini mencakup informasi yang dapat diakses oleh publik (yaitu nama penyedia) yang tersedia dalam format teks dan informasi yang tidak dapat diakses oleh publik (mis. kinerja penyedia) <ul style="list-style-type: none"> <li>Data dari metode pengadaan berikut untuk fase-fase ini juga belum tersedia (belum dikumpulkan):</li> <li>Pembelian elektronik</li> <li>penunjukan langsung, dan</li> <li>pengadaan langsung</li> </ul>	Data masih belum tersedia dalam struktur data LKPP. Ini mungkin memerlukan peningkatan standarisasi data lebih lanjut dari LKPP ke semua entitas pengadaan.

Fase	Data yang Dibutuhkan	Data Yang Tersedia Saat Ini dari Pemerintah
Tender	Tanggal akhir tender Tanggal mulai dan berakhir evaluasi  Jenis peserta lelang (BUMN, Usaha Kecil Menengah, usaha milik perempuan, dll)	Data masih belum tersedia dalam struktur data LKPP

Ini bukan satu-satunya informasi yang diperlukan untuk analisis proyek infrastruktur yang lebih baik. Laporan ini juga mendorong LKPP untuk mempublikasikan lebih banyak data dan informasi rinci dalam Redflags untuk Pemetaan OCDS seperti yang ada di kolom E di lembar 'master'.

## Lampiran 11

### Data Tambahan yang Diperlukan Untuk Diungkapkan Secara Daring

Fase	Data yang Dibutuhkan	Data Yang Tersedia Saat Ini dari Pemerintah
Perencanaan Tender Award	Data dari metode pengadaan berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>e-Purchasing</i>/pembelian</li> <li>penunjukan langsung, dan</li> <li>pengadaan langsung</li> </ul>	Data dari metode pengadaan berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tender cepat</li> <li>Tender</li> </ul>
Perencanaan Tender Award	Semua informasi terkait penyedia yang berpartisipasi dalam pengadaan publik terdaftar di SIKAP <sup>40</sup> . Informasi ini termasuk yang dapat diakses oleh publik (mis. nama penyedia) yang tersedia dalam format teks format dan yang tidak dapat diakses oleh publik (mis. kinerja penyedia)	Tidak tersedia
Tender	Penawar yang berpartisipasi Nilai tawaran	Penawar yang menang Tanggal pengumuman lelang Tanggal Penghargaan
Kontrak Tender	Tanggal Kontrak	

<sup>40</sup> In Indonesia, this vendor management system is called SIKAP -

Sistem Informasi Kinerja Penyedia / Vendor Performance Information System.

## Lampiran 12

### Kualitas Data yang Perlu Ditingkatkan

Fase	Data yang Dibutuhkan	Kualitas Data yang Dapat Diakses oleh Opentender
Perencanaan	<p>Informasi yang tersedia pada Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rincian pekerjaan;</li> <li>• volume pekerjaan;</li> <li>• spesifikasi teknis/KAK;</li> </ul>	Data dapat diakses namun form isian tersebut kosong karena rendahnya tingkat kepatuhan instansi terkait untuk mengisi form data tersebut.
Tender	<p>Informasi yang tersedia pada sistem E-Procurement (LPSE) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyedia yang dikontrak</li> <li>2. Hasil evaluasi pada proses seleksi</li> </ol>	Data dapat diakses namun <i>field</i> tersebut kosong karena rendahnya tingkat kepatuhan instansi terkait untuk mengisi field data tersebut
Tender	Alasan/penjelasan mengapa suatu tender dibatalkan.	Informasi tentang tender yang dibatalkan hanya tersedia dalam format teks bebas.
Implementasi	Semua informasi yang tersedia di Sistem Pemantauan Realisasi Anggaran (Monev Tepra <sup>41</sup> ) mengenai proses pengadaan.	Data dapat diakses namun field tersebut kosong karena rendahnya tingkat kepatuhan instansi terkait untuk mengisi field data tersebut

Untuk pertanyaan/umpan balik tentang penelitian ini, silakan hubungkami di [icw@antikorupsi.org](mailto:icw@antikorupsi.org)

<sup>41</sup>Monev Tepra : Monitoring, Evaluasi, Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran



### **Indonesia Corruption Watch**

Jalan Kalibata Timur IV No.6, RT.10/RW.8,  
Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740

Tel.: +6221.7901885 /+6221.7994015

Fax.: +6221.7994005

IG: @sahabaticw

Twitter: @antikorupsi

Youtube: Sahabat ICW

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)